



Makna Perubahan Identitas Desa Adat di Tengah Pembangunan Pariwisata Budaya di Bali

Anak Agung Putra Dwipayana¹, Sartini²

¹ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 12, 2023

Revised August 18, 2023

Accepted August 24, 2023

Available online August 31, 2023

Kata Kunci:

Perubahan Identitas; Desa Adat; Pariwisata Budaya; *Positioning*

Keywords:

Identity Change; Desa Adat; Cultural Tourism; Positioning



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami makna perubahan identitas desa adat di tengah pembangunan pariwisata budaya di Bali. Pengembangan pariwisata budaya di Bali sangat berpengaruh terhadap kedudukan desa adat, mengingat tujuan pariwisata budaya sebagai daya tarik untuk mempromosikan Bali melalui kekayaan budaya, justru berbanding terbalik menjadi budaya Bali untuk pariwisata. Persoalan ini kemudian menyebabkan terjadinya pemaknaan, perumusan, dan pencarian ulang identitas desa adat sebagai benteng budaya Bali, guna merespon dampak negatif pariwisata terhadap budaya Bali. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data tentang desa adat dan historis perkembangan pariwisata di Bali. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan unsur-unsur metodis yaitu, hereustika, interpretasi, dan deskripsi untuk mengungkap makna perubahan dalam identitas desa adat. Hasil penelitian menunjukkan, identitas desa adat di tengah dinamika pembangunan pariwisata budaya di Bali, terus-menerus mengalami pemaknaan secara ulang. Upaya ini dilakukan pemerintah maupun orang-orang Bali untuk mempertahankan, melestarikan, dan memastikan keberlanjutan tradisi di dalam desa adat

dari dampak negatif pariwisata. Perubahan identitas desa adat ditandai dengan perubahan dari identitas desa adat dengan sifat tradisional yang alami, menjadi identitas formal berdasarkan rumusan yang dibentuk, serta perubahan identitas yang jamak dengan ciri khas dan karakteristik masing-masing desa adat, menjadi identitas yang bersifat general atau disamakan secara keseluruhan dalam bentuk yang terorganisir. Perubahan dalam identitas desa adat merupakan bentuk *positioning*, yaitu diposisikan dan memposisikan desa adat dalam merespon dinamika pembangunan pariwisata nasional melalui wacana pariwisata budaya di Bali.

ABSTRACT

This study is qualitative research aimed at understanding the meaning of the changing identity of traditional villages amidst cultural tourism development in Bali. The development of cultural tourism in Bali has significantly impacted the status of traditional villages. Despite cultural tourism's intended purpose of promoting Bali through its cultural richness, it has paradoxically led to the transformation of Balinese culture for tourism purposes. This issue has consequently resulted in the interpretation, formulation, and rediscovery of the identity of traditional villages as cultural fortresses in Bali to address the negative impacts of tourism on Balinese culture. The data collection technique employed in this study is a literature review to gather information about traditional villages and the historical development of tourism in Bali. The collected data is subsequently analyzed using methodological elements such as hermeneutics, interpretation, and description to reveal the significance of the changes in the identity of traditional villages. The research findings indicate that the identity of traditional villages amid the dynamic cultural tourism development in Bali is continuously being redefined. The government and the Balinese people are trying to preserve and safeguard the traditions within the traditional villages from the adverse effects of tourism. The changes in the identity of traditional villages are characterized by a shift from their naturally traditional and authentic characteristics to a formally defined identity based on established formulations. Moreover, there is a shift towards a more generic and standardized identity, rather than the distinct features and characteristics unique to each traditional village, organized in a unified form. The changes in the identity of traditional villages represent a form of positioning where traditional villages are positioned in response to the dynamics of national tourism development through the discourse of cultural tourism in Bali.

1. PENDAHULUAN

Identitas budaya menjadi persoalan penting di tengah kehidupan masyarakat multikultural, globalisasi, dan modernitas. Kondisi seperti ini melahirkan gelombang kesadaran *local genius* yang menghormati kesamaan pencarian dan perumusan hak tiap identitas etnik, tradisi budaya yang beragam baik secara lisan maupun tertulis atas kebenaran yang secara sah digunakan untuk memaknai hidup (Sutrisno, 2014). Pencarian, perumusan, dan pemaknaan suatu identitas adalah kekuatan di dalam mengubah berbagai ekspresi budaya dan tindakan-tindakan sosial. Munculnya pemaknaan terhadap identitas suatu kelompok tidak terlepas dari tingkat mobilitas sebagai faktor utama dalam pencarian model identitas yang tepat di tengah melebarnya batas-batas lokal menuju ke ruang global (Abdullah, 2006). Dengan kata lain, perpindahan orang-orang dalam suatu budaya ke lingkungan budaya lainnya memunculkan proses reproduksi kebudayaan.

Proses semacam ini adalah proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Hal ini menyangkut pada dua hal yang penting. *Pertama*, pada tataran sosial tampak proses dominasi dan subordinasi budaya terjadi secara dinamis yang memungkinkan untuk menjelaskan dinamika kebudayaan secara mendalam, sedangkan *kedua*, pada tataran individual akan tampak proses resistensi di dalam reproduksi identitas kultural sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya tertentu (Abdullah, 2006). Persoalan ini kemudian dihadapkan pada bagaimana suatu etnis mampu mempertahankan identitasnya di dalam situasi lingkungan sosial budaya yang berbeda dari sebelumnya.

Masuknya pengaruh budaya lain ke dalam suatu lingkungan etnis tertentu tidak dapat dihindari terjadinya reproduksi makna identitas suatu etnis. Hal ini merupakan upaya untuk mempertegas posisi suatu identitas dengan identitas yang lain (Liliwari, 2005). Gambaran perubahan atas meluasnya batas-batas lokal menuju representasi masyarakat global sangat tampak terjadi di Bali. Puncak terjadinya tingkat keterbukaan Bali atas pengaruh globalisasi adalah dengan dibukanya pariwisata sebagai potensi unggulan daerah. Perkembangan pariwisata Bali merupakan sejarah panjang yang mengalami pasang surut dengan berbagai kendala dan permasalahannya (Azhar, 2018). Secara garis besar, pariwisata di Bali berkembang melalui tiga tahap, yaitu (1) tahap pengenalan, merupakan tahap pertama terjadinya interaksi Bali dengan orang asing. Orang luar Bali ini merasakan adanya suatu hal baru dan menarik tentang Bali; (2) tahap reaksi, merupakan bentuk respon dari individu atau kelompok yang melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan demi memuaskan rasa ingin tahu orang luar tentang Bali; dan (3) tahap pelembagaan atau institusionalisasi, yaitu munculnya respon yang lebih bersifat formal untuk menjadi satu-kesatuan integral dalam strategi pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan pariwisata telah banyak membentuk perubahan di Bali, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun orientasi terhadap kosmologi (alam) (Raharjo & Munandar, 1998).

Berbagai aspek kebudayaan Bali yang menjadi gagasan utama dalam pembangunan pariwisata di Bali dihadapkan pada sikap paradoks masyarakat Bali. Satu sisi, gagasan pariwisata budaya mengharuskan Bali mempertahankan identitas tradisionalnya. Namun di sisi lain, masyarakat adat dihadapkan pada kecenderungan modernitas sehingga permasalahan yang dihadapi berdampak pada budaya Bali menjadi komoditas, karena orang-orang Bali tidak dapat membedakan apa yang dijual kepada wisatawan dengan apa yang menjadi tradisi budaya asli (Picard, 2006). Persoalan ini sangat berdampak terhadap kedudukan desa adat yang menjadi ruang hidup dari segala aktivitas yang berkaitan dengan agama, adat, seni, dan budaya Bali. Desa adat sebagai lembaga tradisional yang menyangga kelestarian kebudayaan Bali, sudah seharusnya berperan aktif dalam menyikapi perkembangan pariwisata, mengingat pariwisata budaya dapat eksis tergantung pada keberlangsungan desa adat (Pitana & Setiawan, 2013). Namun jika desa adat mengalami kemunduran, maka dapat dipastikan, pariwisata budaya tidak menemukan tujuannya.

Desa adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang menjalankan aturan pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (*awig-awig*) untuk para warganya, memiliki kekayaan, dan secara hirarkis tidak berada di bawah kekuasaan lain yang lebih tinggi (Parimarta, 2020) menjadikan identitas desa adat kembali dimaknai secara ulang untuk merespon tantangan pariwisata yang tengah menjadi persoalan di Bali. Identitas desa adat sebagai benteng terakhir budaya Bali (Nordholt, 2010), kemudian dirumuskan sifat otonominya hanya berhubungan dan mengurus berbagai persoalan tradisi adat dan aktivitas religi (Triguna, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa identitas desa adat telah dimaknai secara terus-menerus dalam mempertegas kedudukannya di tengah perkembangan globalisasi dan masifnya pembangunan pariwisata di Bali. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap desa adat penting dihadirkan dalam memposisikan desa adat sebagai subjek hukum dalam pembangunan nasional, khususnya di dalam bidang pariwisata (Adnyani & Dantes, 2022).

Pemaknaan secara ulang identitas desa adat menunjukkan identitas budaya di dalam desa adat tidak pernah bersifat final dan terus mengalami perubahan di tengah situasi arus global melalui pariwisata

kian intensif. Sebagaimana During menyatakan bahwa identitas '*in constant mutation*', selalu berubah-ubah dan dinamis atau bermetamorfosis (Putra, 2011). Fenomena tentang identitas desa adat di dalam kuatnya pengaruh pariwisata di Bali, penting untuk dikaji lebih lanjut. Pasalnya, desa adat sebagai suatu entitas kebudayaan Bali mampu mempertahankan keberadaannya di tengah dinamika pembangunan pariwisata budaya. Studi-studi tentang desa adat yang secara khusus membahas dinamika dan tantangannya ditunjukkan oleh beberapa peneliti, seperti Warren (2007) dan Parimartha (2013) yang mengungkap dinamika desa adat di tengah intervensi desa dinas yang mendominasi pada masa kekuasaan Belanda di Bali hingga kebijakan-kebijakan yang hadir pada masa orde baru. Berbeda dari itu, beberapa peneliti juga melihat adanya kemungkinan positif desa adat dalam merespon kehadiran pariwisata, seperti Kartika (2019) melihat peran strategis yang dimiliki desa adat terhadap pembangunan pariwisata, dan Adnyani & Dantes (2022) mengamati kemungkinan melalui pemberdayaan desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mencita-citakan penguatan nilai kapital bagi masyarakat adat. Studi-studi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana fenomena eksterior sistem tradisional adat Bali yang hadir di dalam kedudukan desa adat yang disebabkan oleh berbagai faktor global. Secara tidak langsung berbagai dinamika dan posisi strategis desa adat terhadap kehadiran pariwisata budaya, selama ini menunjukkan identitas desa adat telah mengalami transformasi dalam merespon faktor eksternal tersebut, namun masih representatif dalam ciri khas kehidupan adat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk memetakan dan mengungkap makna perubahan identitas desa adat di tengah pembangunan pariwisata budaya di Bali. Perubahan dalam konteks identitas desa adat, telah terjadi seiring berjalannya waktu, sebagai upaya merespon berbagai pengaruh baru. Munculnya hal tersebut karena adanya kesadaran untuk mempertahankan ciri khas dan karakteristik desa adat di tengah hadirnya berbagai entitas budaya di pulau Bali, namun cara mempertahankan hal tersebut cenderung berbeda-beda yang menuntut segala usaha dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Maka, pencarian, perumusan, dan pemaknaan identitas desa adat secara ulang tidak terhindarkan di dalam situasi dan kondisi global.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan model kualitatif yang berpijak pada *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini lebih memberikan penekanan pada kualitas ilmiah yang meliputi berbagai konsep dan nilai daripada kuantitas. Untuk pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan merujuk pada Picard (2006) *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*; Yudha Triguna (2011) *Mengapa Bali Unik?*; dan Parimartha (2013) *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali* sebagai data primer. Dalam beberapa buku yang diacu untuk memperoleh data primer, peneliti berupaya mengacu pada data yang berhubungan dengan desa adat dan pariwisata budaya. Penelitian ini juga mengacu pada beberapa sumber kepustakaan lainnya sebagai data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, laporan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan unsur-unsur metodis seperti heuristika, interpretasi, dan deskripsi (Bakker & Zubair, 2007). Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam proses analisis bertujuan untuk membangun perspektif tentang identitas budaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Budaya dalam Perubahan

Identitas budaya menjadi hal yang begitu penting di tengah globalisasi dan munculnya masyarakat multikultural di dalam satu teritorial. Konsep identitas budaya muncul dari berbagai pemikir maupun aliran. Ada tiga model pemikiran tentang identitas budaya, yaitu pandangan dari esensialisme, konstruktivisme, dan terakhir adalah *culture studies* yang lahir dari pemikiran Stuart Hall. *Pertama*, pemikiran identitas dalam corak pemikiran esensialisme yang bersifat ajeg atau tetap. Stuart Hall mendefinisikan identitas budaya sebagai hal yang tunggal, budaya bersama, atau dengan kata lain, merupakan 'satu diri sejati' suatu kolektif yang dipaksakan kehadirannya secara artifisial dan dipegang teguh oleh kelompok dengan kesamaan historis dan genealogi. Definisi ini mencerminkan identitas budaya berakar dari pengalaman sejarah yang sama dan kode-kode budaya bersama yang memberikan identifikasi sebagai hal yang tunggal dalam kerangka referensi dan makna yang stabil, tetap, dan berkelanjutan di tengah konflik dan perubahan keadaan sejarah yang sebenarnya (Hall, 1990).

Perspektif esensialis di dalam perkembangannya diklasifikasi dua yakni paham esensialis klasik dan modern. Dasar pemikiran esensialis klasik mengasumsikan tidak adanya kesinambungan jika bentuk-bentuk itu terdapat perbedaan. Sedangkan corak pemikiran esensialis modern memiliki asumsi bahwa fenomena mempunyai karakter alami, baik secara biologis maupun kultural. Karakter pemikiran demikian sangat erat hubungannya dengan isu-isu kontemporer seperti budaya, seks, gender, dan agama yang berkembang di masyarakat (Afala, 2018). Identitas pada konteks ini dianggap hal yang pasti. Dengan kata lain, identitas adalah status yang terberi dan tidak berubah. Pengikut pandangan ini meyakini adanya esensi

disetiap orang sebagai penanda jati dirinya sehingga identitas dianggap tetap, *fixed*, tidak berubah dan tunggal (Paramita, 2020). Pengertian identitas semacam ini berupaya memposisikan diri yang mengidentik di dalam suatu perbedaan dengan lainnya secara dangkal.

Konsepsi identitas budaya sebagaimana corak pemikiran esensialisme, menurut Stuart Hall, konsep identitas budaya yang seperti itu, telah berhasil memainkan peran penting di dalam keberlanjutan masyarakat pasca-kolonial. Hal yang penting dalam konteks ini adalah telah membentuk kembali dunia manusia secara mendalam, terkait kerangka konsep budaya dan menjadi kekuatan yang kreatif dalam membentuk representasi identitas diantara orang-orang yang termarginalkan (Stuart Hall, 1990). Upaya penemuan kembali gambaran imajinatif identitas esensial suatu masyarakat melalui praktik representasi, menurut Stuart Hall, telah memainkan peran penting di dalam hadirnya gerakan-gerakan sosial, seperti feminis, anti kolonial, dan anti rasis yang menjadi saksi atas hadirnya kekuatan kreatif yang berkelanjutan dari konsepsi identitas model pertama, seperti merekonstruksi gambaran masa lalu suatu komunitas melalui media sebagai teks, di mana teks tersebut sebagai tindakan reunifikasi imajiner. Hal yang terpenting dalam tindakan ini adalah gambaran dari hasil koherensi imajinasi berusaha dipaksakan ke dalam pengalaman masyarakat. Sederhananya, politik representasi visual dan sinematik mampu merekonstruksi identitas masyarakat, terkait menemukan kembali hal yang esensial di dalam budaya suatu komunitas.

Berbeda dengan pandangan pertama, ada cara berfikir kedua terkait identitas budaya. Dalam posisi *kedua*, identitas budaya dijelaskan sebagai sesuatu yang tidak tetap atau dianut oleh aliran konstruktivisme (anti-esensialisme). Ada 5 pendasaran mengenai identitas di dalam paham pemikiran konstruktif yakni: (1) pengalaman manusia tentang dunia itu diatur; (2) bahasa menyediakan dasar untuk memahami dunia; (3) realita kehidupan sehari-hari adalah milik bersama; (4) adanya tipifikasi bersama realitas yang terinstitusionalisasi, dan (5) pengetahuan bisa diinstitusionalisasi pada level masyarakat atau kelompok sosial. Dasar-dasar tersebut menyiratkan anggapan bahwa realita sosial dimaknai tidak sebagai sesuatu yang terberi, tapi merupakan sebuah proses konstruktif secara berlanjut (Paramita, 2022).

Perbedaan antara cara berfikir tentang identitas antara cara esensialis dan anti-esensialis menunjukkan perbedaan yang jelas dan signifikan. Identitas budaya dalam pengertian yang kedua adalah persoalan *becoming* (menjadi). Hall menggarisbawahi identitas budaya dalam konteks kedua merupakan bukan sesuatu yang sudah ada yang melampaui waktu, tempat, sejarah, dan budaya, namun layaknya seperti sejarah. Artinya, identitas budaya adalah budaya yang mengalami transformasi terus-menerus (Stuart Hall, 1990). Jadi apa yang selama ini dikenal sebagai identitas secara esensial sesungguhnya identitas yang tunduk pada 'permainan' sejarah, budaya, dan faktor kekuasaan yang terus-menerus mengadakan transformasi. Pandangan ini justru sangat jauh dari apa yang diyakini oleh kaum esensialis.

Dengan berpijak pada pandangan konstruktivitas, Stuart Hall kemudian menyatakan sebuah identitas budaya yang berhasil melekat dalam diri setiap orang bukan bentuk 'memulihkan kondisi masa lalu' dan bukan juga sebagai bentuk pengidentifikasian individu sebagai 'siapa ia' sesungguhnya atau sebenarnya. Melainkan identitas tersebut hadir sebagai cara individu diposisikan atau memposisikan diri di dalam suatu narasi masa lalu. Oleh karena itu, identitas budaya yang mengalami transformasi sebagai proses kementerian selalu dihadapkan pada *positioning* yaitu, diposisikan dan memposisikan di dalam waktu, sejarah, tempat, dan kekuasaan yang dominan. Hal inilah yang ditunjukkan Stuart Hall dengan apa yang disebut sebagai *traumatic character* dari 'colonial experience' atau pengalaman-pengalaman yang dihasilkan dari rezim kolonial membentuk suatu katakter traumatis. Mengacu pada Edward Said dan Michel Foucault, Hall berpendapat bahwa karakter traumatik ini kemudian membentuk cara seseorang memahami, melihat, dan mengalami 'diri sendiri' sebagai 'Yang lain' dari wacana dominan rezim (Stuart Hall, 1990).

Identitas budaya dalam perspektif Hall merupakan titik-titik identifikasi yang dilakukan dengan upaya reunifikasi secara tidak stabil yang dibuat dalam wacana sejarah dan budaya. Artinya, identitas budaya merupakan suatu rangkaian produksi dan identifikasi budaya yang tidak pernah selesai. Maka identitas budaya bukan hal yang esensi, namun *positioning* atau memposisikan diri di dalam suatu situasi tertentu. Fakta yang tidak dapat diabaikan dalam kasus seperti ini adalah hadirnya politik identitas yang tidak menjamin secara mutlak tercapainya sesuatu yang identitas murni di dalam penemuan identitas budaya individu pada situasi kolektif.

Dengan demikian, identitas budaya adalah lanskap yang dibangun dari aspirasi kolektif, dirumuskan sebagai lawan dari ancaman anomie. Artinya wacana-wacana identitas mengemuka dalam upaya membangun *positioning* ketika berhadapan dengan situasi anomie seperti yang disebabkan oleh masuknya modernitas dan modal yang membuatnya terdesak untuk merumuskan kembali identitasnya dengan mengacu narasi masa lalu yang dianggap mampu memberikan posisi terhadap dirinya. Hal ini dipertegas oleh Hall dalam kalimat sebagai berikut: identitas sebenarnya adalah nama yang kita berikan pada berbagai cara kita memposisikan diri.

Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali

Desa di Bali terdiri dari dua jenis, yaitu (1) desa yang identik dengan birokrasi pemerintah atau desa dinas (kelurahan/prabekel); dan (2) desa yang di dalamnya terdapat masyarakat dengan segala aturan tradisional, adat istiadat, serta identik dengan keberadaan *pura kahyangan tiga* yang menjadi ruang terselenggaranya aktivitas religi *krama* (warga adat) yang dikenal sebagai desa adat. Dalam terminologi lokal Bali, istilah desa adat disebut dengan *desa pakraman*. Namun, semenjak diberlakukannya Pergub Nomor 04 Tahun 2019, *desa pakraman* digantikan istilahnya menjadi desa adat dengan jumlah sebanyak 1493 desa adat (Ardana et al., 2020). Desa adat sebagai satuan lembaga yang dinaungi oleh masyarakat adat secara umum memiliki aturan baik lisan maupun tulisan yang dikenal dengan istilah *perarem* atau *awig-awig* sebagai payung hukum desa adat (Warren, 2007). Secara khusus, masing-masing desa adat memiliki aturan yang bersifat otonom sehingga berbagai varian dapat ditemukan di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari unsur kewilayahan, di mana setiap desa adat memiliki suatu kondisi atau keadaan, baik atas keberadaan alam maupun aspek lainnya yang melahirkan berbagai tradisi dan ekspresi masyarakat. Maka, aturan adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh suatu keadaan tempat serta waktu di dalamnya, atau yang dikenal dengan *desa kala patra* atau *desa mawa cara* (Suadnyana, 2020).

Keberagaman atau berbagai varian yang mencerminkan karakteristik desa-desa tradisional di Bali, setidaknya dapat dijelaskan secara sederhana melalui klasifikasi yang dibentuk oleh para peneliti sebelumnya dan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA). Ada tiga klasifikasi desa adat, diantaranya: *Desa Bali Aga*, *Desa Bali Apanage*, dan *Desa Bali Anyar* (Suacana, 2011). Ketiga klasifikasi desa adat ini memiliki kekhasannya masing-masing dan mencerminkan identitas yang beragam pada desa adat di Bali. Kekhasan identitas dari ketiga klasifikasi desa adat, dua diantaranya, yakni *Desa Bali Apanage* dan *Desa Bali Anyar* disebut hadir belakangan dengan membawa khas identitasnya dari tempat asalnya dan berintegrasi dengan situasi dan kondisi di Bali pada masa kedatangannya, sebagaimana Stuart Hall menganggap identitas budaya adalah sesuatu yang tidak tetap, namun selalu dalam proses menjadi dalam tindakan reproduksi budaya.

Pertama, Desa Bali Aga merupakan desa adat yang teritori kewilayahannya mencakup dataran tinggi di Bali. Istilah 'aga' memiliki arti gunung, maka *Desa Bali Aga* adalah desa yang berada di daerah pegunungan, dengan kata lain, istilah ini menunjukkan kondisi geografis. Secara spesifik, *desa bali aga* merupakan desa adat yang telah hadir di Bali dalam bentang waktu 800-1343 Masehi atau pra-Majapahit. Artinya, *Desa Bali Aga* merupakan desa yang hidup pada masa Bali Kuno dengan berbagai ciri khas tradisi yang masih terlaksana hingga dewasa ini. Peneliti tentang desa tradisional di Bali, mengungkapkan bahwa, keberadaan *Desa Bali Aga* menunjukkan sikap mempertahankan tradisi kecilnya di tengah pengaruh luar, seperti pengaruh Majapahit, globalisasi, modernisasi, termasuk pariwisata (Ardana et al., 2020). Namun, bentuk pemertahanan itu tidak cenderung menunjukkan anti perubahan. Justru, beberapa desa-desa *Bali Aga* kenyataannya tidak terlepas dengan pengaruh luar. Walaupun tradisi-tradisi yang diberlakukan di masing-masing desa masih tampak di dalam tindakan warga adat sebagai suatu ritus. Namun berbagai pengaruh juga diterima sebagai suatu yang wajar, sehingga keberlanjutan tradisi yang telah muncul dari tetua desa mampu beradaptasi dengan kondisi jaman yang baru (Warren, 1993). Tradisi kecil ini yang kemudian dikatakan masih bertahan di tengah tradisi-tradisi besar pengaruh Hindu-Jawa/Majapahit berikutnya hadir di Bali.

Swelengrebel menyatakan berbagai tradisi yang menyertai *desa bali aga* merupakan representasi dari peradaban Bali sebelum mendapat pengaruh Hinduisme. Adapun beberapa hal yang mencerminkan ciri khas *Desa Bali Aga*: (1) perekonomian masyarakat sangat erat kaitannya dengan sistem persawahan; (2) bentuk-bentuk rumah adat kecil dan dibuat dengan kayu atau bambu; (3) asas musyawarah dengan deferensi dan stratifikasi sosial yang sederhana; (4) keterampilan membuat benda-benda kerajinan menggunakan unsur logam dan tenun; (5) aktivitas pemujaan memiliki konteks hubungan kekerabatan; (6) setiap upacara di dalam pura terjadi cukup rumit; (7) aspek kebahasaan lebih dinominasi bahasa lisan; dan (8) kesenian identik hadir pada rangkaian aktivitas adat dan agama seperti: selonding, dan tarian sang hyang (Suacana, 2011). Keunikan sosial budaya yang dimiliki masyarakat *Desa Bali Aga* lainnya adalah tidak terdapat tingkatan sosial berdasarkan keturunan (kasta), rohaniawan tidak berdasarkan pada upacara *dwijati* sebagaimana yang hadir setelah pengaruh Hindu-Majapahit di Bali, dan kepemimpinan desa umumnya menganut senioritas yang sangat ditentukan berdasarkan usia perkawinan. Hal ini dipandang karena lebih banyak tahu tentang tradisi yang berlaku di dalam suatu desa. Konsep kepemimpinan *Desa Bali Aga* identik diduduki oleh dua jabatan. Artinya, kedudukan pemimpin didasarkan pada satu jabatan diduduki oleh dua orang sebagai pemimpin. Keberadaan desa-desa *Bali Aga* terdapat di beberapa wilayah kabupaten di Bali, khususnya wilayah yang memiliki kawasan pegunungan, seperti Bangli, Karangasem, Jembrana Buleleng, dan Gianyar.

Kedua, Desa Bali Apanaga adalah desa adat yang kedudukannya secara umum berada wilayah Bali daratan. Munculnya *Desa Bali Apanaga* tidak terlepas dari ekspansi besar-besaran dari orang-orang

Majapahit yang berhasil menundukkan Bali pada abad ke 14. Keberhasilan Majapahit menguasai Bali, berdampak pada berbagai pengaruh terhadap sistem sosial-budaya di Bali. Pengaruh ini sebagian besar terhadap sistem kemasyarakatan dan sistem religi yang mengasimilasi dengan kearifan lokal yang telah berkembang sebelum kehadiran pengaruh Majapahit. Cerminan masyarakat *Desa Bali Apanaga* sangat erat tradisinya dipengaruhi Hindu-Majapahit dan juga telah mendapatkan pengaruh dari Hindu-Jawa. Walaupun sebagian besar dipengaruhi oleh Hindu-Majapahit, tetapi beberapa hal dalam tradisi desa-desa tradisional pra-Majapahit di Bali dapat di temukan kekhasannya. Artinya, pengaruh kekuasaan Majapahit di Bali tidak seutuhnya menggantikan budaya masyarakat di Bali. Hal-hal yang dapat diketemukan di dalam tradisi *Desa Bali Apanaga*, diantaranya: (1) perekonomian utama adalah persawahan; (2) sentral kekuasaan berada pada *puri* (istana); (3) rohaniawan adalah *pedanda* (pendeta Hindu); (4) tradisi tulisan lebih mendominasi dengan adanya sastra-sastra agama; (5) terdapatnya stratifikasi sosial berdasarkan keturunan; (6) *ngaben* sebagai upacara kematian; (7) sistem penanggalan berdasarkan kalender *saka*; (8) munculnya kesenian pedalangan; (9) motif-motif arsitektur bercirikan Hindu-Buddha; dan (10) munculnya kesenian tari topeng di dalam upacara agama (Suacana, 2011). Secara umum, keberadaan *Desa Bali Apanage* melingkupi wilayah dataran Bali. konsep kepemimpinan dalam *Desa Bali Apanage* bersifat tunggal yang cukup berbeda dengan konsep kepemimpinan di dalam desa-desa *Bali Aga* yang dominan bersifat dualisme.

Ketiga, Desa Anyar sebagai desa adat yang kemunculannya di Bali belakangan. *Desa Anyar* yaitu desa yang hadir disebabkan karena terjadi transmigrasi lokal internal Bali yang bertujuan untuk memperoleh mata pencaharian hidup. *Desa Anyar* terdapat di beberapa daerah Bali Barat seperti di Jembrana dan Buleleng Barat. Beberapa ciri khas budaya yang dapat ditemukan di dalam desa ini masih menyerupai ciri-ciri *desa Bali Apanaga*, karena dalam sekian bentang waktu munculnya *Desa Bali Apanaga* cukup mendominasi dan dianggap merepresentasikan desa tradisional di Bali (Suacana, 2011). Disisi lain, munculnya *Desa Anyar* tidak terlepas dengan perpindahan masyarakat desa-desa yang ada di Bali ke dalam suatu wilayah, maka ciri-ciri budaya di dalam *Desa Anyar* masih mencirikan representasi budaya dari suatu tradisi desa yang mendominasi citra Bali dan juga tradisi-tradisi yang dibawa masyarakat *Desa Anyar* dari tradisi sebelum perpindahan ke desa baru yang telah mempengaruhi bawah sadarnya.

Jika diperhatikan dari uraian di atas, terlihat bahwa masyarakat *Desa Bali Aga*, masyarakat *Desa Bali Apanaga*, dan *Desa Anyar* ketiganya lebih menonjolkan sektor agraris sebagai mata pencaharian utama. Hal ini menunjukkan bahwa warga di dalam desa adat dapat dikategorikan sebagai masyarakat agraris. Namun, terdapat perbedaan-perbedaan lain yang menonjol, seperti perbedaan dalam praktik religi, sistem sosial, seni, dan sastra. Selain itu, beberapa hal lainnya yang dapat dilihat dan dikomparasikan adalah stratifikasi sosial yang berhubungan dengan struktur masyarakat yang terbagi menjadi lapisan-lapisan atau tingkatan (MS et al., 2022). Walaupun demikian, ciri karakteristik berdasarkan tipologi ini selalu mengalami dinamika. Apalagi hadirnya pariwisata tidak dipungkiri bahwa masyarakat adat mengandalkan hidup dari sektor agraris sebagaimana telah mengalami transformasi ke sektor industri jasa pariwisata. Dengan demikian, perubahan-perubahan tentunya membawa pada cara masyarakat adat dalam beradaptasi dengan pengaruh yang lebih baru.

Pembangunan Pariwisata Budaya dan Dinamika Desa Adat

Dalam bagian tulisan ini, hendak dipetakan titik perubahan identitas desa adat di Bali pasca konflik tahun 1965. Pasca konflik berdarah G30S tahun 1965 menjadi titik awal pemulihan kembali citra Bali di dunia internasional. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam upaya pemulihan ini diantaranya, pemulihan kembali pariwisata di Bali oleh rezim orde baru dan membangun citra Bali yang telah terkenal sebelumnya. Pada titik ini, intervensi pemerintah terhadap desa adat mulai muncul. Ketika pemerintah orde baru berusaha memulihkan situasi politik dan ekonomi di seluruh Indonesia melalui kebijakan pariwisata, hal ini memberikan dampak yang serius bagi masyarakat Bali. Ini dikarenakan pemerintah orde baru, melalui kerjasamanya dengan pihak asing, memiliki rencana untuk menjadikan Bali sebagai proyek percontohan dalam pengembangan pariwisata nasional. Kebijakan ini didasarkan pada konsep bahwa Bali adalah sebuah pulau surga yang terkenal di seluruh dunia sejak masa kolonial. Dengan demikian, pemerintah orde baru mengadopsi dan meneruskan pandangan identitas Bali pada era kolonial sebagai dasar untuk mengembangkan industri pariwisata (Paramita, 2022).

Rencana pengembangan pariwisata Bali menyisakan dinamika perihal wacana identitas. Di satu sisi pemerintah orde baru berupaya mereproduksi identitas Bali untuk kepentingan pengembangan pariwisata, namun di sisi lain masyarakat Bali khususnya para budayawan dan intelektual Bali mencemaskan dampak pariwisata Bali terhadap budaya Bali. Dinamika ini tercermin melalui diskusi dan seminar perihal Pariwisata Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Bali di tahun 1971. Para peserta mengakui jika aktivitas budaya menjadi daya tarik utama bagi pariwisata, namun invasi pemodal asing ke pulau mereka menjadi semacam pobia akan terjadinya "polusi kebudayaan" (Picard, 2020). Diskusi

pada saat itu melahirkan sebuah jargon—yang bisa dikatakan sebagai bentuk negosiasi atas situasi dan kondisi Bali saat itu—yakni pariwisata budaya.

Terminologi ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwasannya identitas budaya dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, begitu juga sebaliknya pendapatan pariwisata nantinya digunakan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan budaya Bali. Menurut Darma Putra konsep pariwisata budaya dianggap menjadi langkah strategis untuk pembangunan industri turisme dan menjadi daya tarik wisata, tetapi tujuannya memanfaatkan keuntungan pariwisata untuk pelestarian budaya. Konsep ini dirumuskan di tengah kekhawatiran akan hancurnya budaya Bali akibat pengaruh budaya barat (I. Putra, 2008). Namun dalam perkembangannya, pariwisata budaya yang dianggap sebagai kekuatan pengembangan pariwisata tanpa menghancurkan budaya Bali, justru berbalik arah menjadi budaya pariwisata. Budaya pariwisata yang dimaksud ialah budaya yang dalam proses pertumbuhan atau pembinaannya dipengaruhi atau ditujukan untuk pariwisata. Di sini terjadi pergeseran, gagasan awal pariwisata untuk Bali akhirnya berubah menjadi Bali untuk pariwisata (Suryawan, 2005).

Pergeseran gagasan tentang pariwisata Bali telah memunculkan respon terhadap perkembangan pariwisata, khususnya pembedaan agama dari identitas etnik. Hal-hal yang berbau etnik dihubungkan dengan wilayah profan dan dipromosikan menjadi tontonan pariwisata, sementara agama mencari jangkauannya yang lebih luas. Padahal di dalam kehidupan komunal masyarakat Bali, hal-hal yang berbau etnik tidak dapat dipisahkan dengan agamanya, mengingat dalam praktik-praktik keagamaan tradisional di Bali adalah cerminan dari adat-istiadat dari masing-masing desa adat (Malik, 2016). Oleh karena itu, muncul wajah baru tentang identitas desa adat sebagai ruang dipraktikkannya berbagai tradisi menjadi sesuatu yang sangat erat bersinggungan dengan pariwisata. Terutama, tradisi-tradisi yang sangat kental dengan ciri khas budaya Bali menjadi andalan destinasi pariwisata.

Proyek-proyek pariwisata di rezim orde baru sangat berpengaruh pada perubahan identitas Bali. Budaya menjadi *brand* yang membedakan Bali sebagai resor wisata dari destinasi lain di Indonesia dan Asia Tenggara. Pertunjukan adat, khususnya upacara ritual di pura yang produktif dengan sesajen dan laki-laki-perempuan berpakaian adat yang indah, merupakan andalan promosi pariwisata di era Orde Baru (Hauser-Schäublin, 2013). Hal ini berdampak pada rancunya posisi budaya Bali akibat terbukanya budaya Bali terhadap pariwisata. Dalam merespon kasus tersebut, muncul penegasan tentang yang sakral dan profan. Penegasan atas klasifikasi yang dibuat berdasarkan apa yang sakral dan profan sangat berpengaruh terhadap pemaknaan ulang dari keberadaan desa adat untuk merespon kehadiran pariwisata yang tengah berkembang di Bali.

Pembangunan pariwisata yang masif menjadikan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam mendukung gagasan pariwisata budaya, serta mengantisipasi ancaman negatif dari pengaruh pariwisata terhadap budaya Bali. Upaya yang dilakukan terutama yang berakitan dengan desa adat adalah dibuatkannya Perda untuk melindungi desa adat, mengingat citra budaya Bali termuat di dalam kehidupan desa adat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertegas peran desa adat di Bali. Dalam Peraturan Daerah Bali No. 06/1986 dirumuskan bahwa: desa adat sebagai desa *dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatakan *kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, Peraturan Daerah No. 06/1986 kemudian di gantikan Peraturan Daerah No. 03/2003 yang mengganti istilah desa adat dengan *desa pakraman*, sedangkan substansinya tetap sama dengan peraturan sebelumnya (Suryawan, 2020).

Pergantian istilah ini sesungguhnya untuk mempertegas identitas etnik Bali dengan menggunakan istilah yang lahir dari kearifan lokal. Istilah *pakraman* berakar dari kata *karaman* yang diterjemahkan menjadi desa, orang-orang desa, pemuka-pemuka atau tetua desa (Suryawan, 2020). Namun, perubahan kembali istilah *desa pakraman* menjadi desa adat setelah diberlakukannya Perda No. 04/2019. Dalam Perda ini ada penambahan substansi dengan memasukan *Sad Kerthi* yang merupakan landasan program kepemimpinan Gubernur Koster dan Tri Sakti dari Soekarno (Suryawan, 2020). Peraturan daerah tersebut mengatur tentang desa adat sebagai satu-kesatuan hukum adat Bali, yang terumuskan dengan sistem-sistem aturan adat di Bali seperti ketegasan teritorial desa adat, hak-hak tradisional yang melekat, adat-tradisi, dan lain sebagainya. Namun penambahan substansi aturan ini sangat menonjol dengan adanya program Gubernur Bali yaitu desa adat didasarkan pada nilai *tri hita karena* bersumber dari *sad kerthi* dengan spirit ajaran Hindu serta nilai kearifan lokal Bali (Yasa, 2020). Hal ini dianggap memiliki peranan besar didalam pembangunan nasional sehingga perlu mendapat pengayoman, perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adat di Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Berdasarkan uraian di atas, point utama yang menunjukkan terjadinya perubahan dan reproduksi dalam identitas desa adat di tengah masifnya pembangunan pariwisata di Bali. *Pertama*, desa adat sebagai

lembaga tradisional Bali memuat berbagai aktivitas kehidupan masyarakat dengan tradisi etnik yang bersinergi dengan unsur-unsur religi; *kedua*, desa adat di Bali memiliki identitas beragam yang dicirikan dalam praktik-praktik tradisi dan religi; *ketiga*, regulasi pemerintah orde baru maupun daerah memperkenalkan gagasan pariwisata budaya melalui citra budaya Bali; *keempat*, citra pariwisata budaya yang dibangun pemerintah, secara tidak langsung mengobjekkan desa adat sebagai representasi budaya Bali untuk promosi pariwisata; dan *kelima*, dampak negatif dari pariwisata menjadikan identitas desa adat dirumuskan secara ulang dan general melalui peraturan daerah dengan menghasilkan program-program yang dianggap bersinergi dengan budaya Bali; dan *keenam*, perumusan ini merupakan upaya lebih lanjut dalam menyikapi dinamika budaya yang dihadirkan oleh pembangunan pariwisata di Bali.

Dengan demikian, perubahan dan reproduksi dalam identitas desa adat di Bali merupakan upaya penguatan, pelestarian, dan pemertahanan budaya Bali dalam merespon dinamika pariwisata di Bali. Perubahan ini ditandai dengan terorganisasinya desa adat dalam format pemerintah daerah yang sangat berbeda dengan substansi desa adat sebagai suatu ruang hidup masyarakat tradisional, dan tercermin dalam aktivitas masyarakat adat yang alami.

Positioning dalam Pemaknaan Ulang Identitas Desa Adat di Bali

Perumusan ulang identitas desa adat di tengah pembangunan dan perkembangan pariwisata tidak terlepas dari upaya pemerintah orde baru dan pemerintah daerah Bali untuk memajukan taraf ekonomi nasional. Pengembangan pariwisata dilihat sebagai salah satu pilihan yang tepat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Parimarta, 2013). Melalui gagasan pariwisata budaya, pemerintah menjadikan gagasan tersebut sebagai modal promosi turisme, dengan memperkenalkan Bali dengan citra budaya tradisionalnya yang identik pada praktik-praktik tradisi, adat-istiadat, agama, kesenian masa lalu. Citra budaya Bali yang menjadi produk turisme pada masa pemerintah orde baru adalah citra identitas Bali yang dikonstruksi pada era kolonial. Citra ini sangat representatif dengan berbagai aktivitas masyarakat Bali dalam kehidupan desa adat.

Melalui citra ini, identitas budaya Bali kembali diperkenalkan oleh pemerintah orde baru untuk mensukseskan program pariwisata nasional dan Bali menjadi *pilot project* dari program tersebut. Secara tidak langsung, Bali melalui kehidupan komunal desa adat telah dipertahankan, dilestarikan, dan diformalkan dalam wacana identitas asli Bali menurut perspektif rezim. Hal ini sejalan dengan pandangan Stuart Hall bahwa, identitas budaya Bali yang tercermin dalam kehidupan desa adat, bukan merupakan upaya memulihkan keaslian masa lalu dan mempertahankan gambaran masyarakat desa adat dengan karakteristik aslinya, melainkan upaya rezim memposisikan masyarakat desa adat di Bali untuk mensukseskan gagasan pariwisata budaya di Bali.

Dalam perkembangan selanjutnya, kesadaran masyarakat desa adat terkait dengan identitasnya, memunculkan perasaan dilematis atas perkembangan pariwisata yang semakin mendominasi di pulau Bali. Ketakutan akan tergerusnya budaya Bali dengan kehadiran budaya barat melalui wisatawan, memunculkan kebijakan pemerintah untuk mempertegas posisi budaya Bali tentang apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak bagi pariwisata. Pada hal ini terbentuk rumusan tentang aspek-aspek budaya yang sakral dan profan. Wilayah yang dikategorikan profan seperti pertunjukan adat dibenarkan bagi kepentingan pariwisata, sedangkan hal-hal yang sakral (berhubungan dengan agama) tidak dimasukkan ke dalam promosi pariwisata. Padahal dalam tradisi turun-temurun dari masing-masing desa adat di Bali, persoalan sakral dan profan tidak dapat dipertegas secara jelas, karena praktik-praktik adat di dalam desa adat sangat bersinggungan dengan unsur-unsur religi masyarakat. Artinya, berbagai praktik tradisi, adat-istiadat, dan seni selalu mengandung unsur sakral dalam praksisnya.

Berdasarkan uraian di atas, adanya keterdesakan desa adat di tengah perkembangan pariwisata Bali. Gagasan pariwisata budaya telah menghasilkan suatu rumusan identitas tentang desa adat di Bali sehingga selama ini desa adat berupaya ditemukan makna aslinya dalam representasi rezim, sebagaimana Stuart Hall memandang bahwa representasi identitas budaya tidak terlepas dari gambaran imajinatif tentang masa lalu dan titik identifikasi yang dilakukan dengan upaya pemulihan kembali identitas asil, dilakukan secara tidak stabil yang dibuat dalam wacana sejarah dan budaya, maka identitas desa adat merupakan suatu rangkaian produksi dan identifikasi budaya yang tidak pernah selesai (Stuart Hall, 1990).

Penegasan identitas desa adat oleh pemerintah di tengah pembangunan pariwisata budaya sesungguhnya bukan bentuk menjadikan masyarakat adat hadir dalam kondisi masa lalu atau sebagai bentuk pengidentifikasian individu sebagai bentuk identitas asli (Stuart Hall, 1990), namun penegasan identitas tersebut hadir sebagai cara desa adat dalam memposisikan dan diposisikan di dalam suatu narasi masa lalu yang tidak lain sebagai bentuk *positioning* dalam dinamika pembangunan pariwisata di Bali. Oleh karena itu, identitas desa adat yang mengalami transformasi sebagai proses kemenjadian selalu dihadapkan pada *positioning* di dalam waktu, sejarah, tempat, dan kekuasaan yang dominan (Stuart Hall, 1990) sehingga identitas itu sebagai ciptaan yang terus-menerus terjadi seiring dengan dinamika ruang dan waktu (Barker,

2005). Dengan demikian, makna perubahan dalam identitas desa adat di tengah dinamika pembangunan pariwisata merupakan sebuah upaya *positioning* atau dengan kata lain, membentuk cara desa adat dalam memahami, melihat, dan mengalami 'diri sendiri' sebagai 'yang lain' dari wacana dominan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Desa adat sebagai *leading center* kebudayaan Bali memperoleh maknanya di tengah situasi anomie. Situasi ini menyebabkan terjadinya penegasan secara ulang identitas desa adat sebagai benteng terakhir budaya Bali. Masifnya pembangunan pariwisata Bali dengan gagasan pariwisata budaya, telah menjadikan desa adat sebagai objek untuk mensukseskan program tersebut. Tidak dipungkiri bahwa, pariwisata budaya yang digunakan sebagai *icon* pariwisata Bali mengharuskan citra Bali dengan berbagai wujud tradisionalnya dipertahankan dan dilestarikan. Hal ini tentunya sangat berdampak pada keberadaan desa adat yang mencerminkan berbagai tradisi, adat-istiadat, religi masyarakat Bali. Tentunya desa adat dalam konteks ini dituntut untuk merespon dinamika dari pembangunan pariwisata budaya sehingga tidak terkikis dan kehilangan jati dirinya. Selama ini, jati diri desa adat berusaha dipertahankan di tengah dinamika pembangunan pariwisata, namun hal yang tidak dapat diabaikan adalah perubahan-perubahan identitas desa adat dalam menghadapi situasi anomie. Maka dari itu, perubahan dalam identitas desa adat merupakan bentuk *positioning*, yang mengedepankan semangat memosisikan dan diposisikannya desa adat untuk merepresentasikan jati diri dan katakteristiknya sebagai bentuk pemaknaan ulang dalam merespon waktu, sejarah, budaya, dan situasi yang berubah. Dalam hal ini, rezim yang dominan menjadi penentu di dalam terwujudnya identitas untuk mempertahankan keberadaan dan memastikan keberlanjutan desa adat. Melalui penelitian ini, rekomendasi dipertunjukkan kepada pemegang kebijakan, baik di tingkat regional maupun nasional. Kebijakan tentang desa adat di Bali secara khusus, sudah seharusnya didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan historis dan filosofis untuk mempertegas posisi desa adat kedepannya. Dalam hal ini, *positioning* tidak secara tegas mempertimbangkan apakah perubahan ini membawa dampak positif maupun negatif, namun *positioning* yang ditunjukkan dari keberadaan desa adat adalah sebuah sifat dinamis kebudayaan Bali. Kedinamisan sifat kebudayaan Bali dalam memosisikan berbagai entitas di dalamnya—termasuk manusia dan lembaga seperti desa adat—merupakan kecenderungan yang tumbuh dalam kebudayaan Bali sehingga secara tidak langsung, desa adat sebagai lembaga tradisional selalu mengalami transformasi yang disesuaikan dengan tantangan jaman. Hal ini sangat tegas tentang bagaimana relasi yang terjadi diantara manusia dan lingkungan selalu tumbuh dalam suatu kesadaran bersama. Sedangkan bagi peneliti lainnya, pemahaman tentang identitas desa adat penting dipahami sebagai bentuk keberlanjutan kebudayaan Bali yang telah tumbuh dan berkembang sebagai salah satu identitas budaya nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam mengadakan studi-studi lanjut terhadap desa adat di dalam berbagai perspektif keilmuan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Adnyani, N. K. S., & Dantes, N. K. F. (2022). Pemberdayaan Desa Adat dalam Pembangunan Pariwisata untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Komunitas Krama. *WIDYA LAKSANA*, 11(1), 61–75.
- Afala, L. M. (2018). *Politik identitas di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Alo Liliweri. (2005). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. LKiS.
- Ardana, I. K., Maunati, Y., Budiana, D. K., Zaenuddin, D., Gegel, I. P., Kawiana, I. P. G., Muka, I. W., & Wibawa, I. P. S. (2020). *Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali*. Cakra Media Utama Kerjasama Universitas Hindu Indonesia Litbang Bapeda.
- Azhar, M. A. (2018). Relasi pariwisata, budaya, dan agama dalam kehidupan masyarakat Bali. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 2, 1560–1577.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (2007). *Metodologi penelitian filsafat*. Kanisius.
- Barker, C. (2005). *Culture Studies: Teori dan Praktik*. PT Bentang Pustaka.
- Hauser-Schäublin, B. (2013). How indigenous are the Balinese? From national marginalisation to provincial domination. *Adat and Indigeneity in Indonesia*, 133.
- Kartika, N. G. A. (2019). Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat dan Pariwisata. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 4(1), 1–16. DOI: <https://doi.org/10.25078/pba.v4i1.773>
- Malik, F. (2016). Peranan kebudayaan dalam pencitraan pariwisata bali. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 11(1), 67–92.
- MS, S. I., Gegel, I. P., Windia, I. W. P., & Dwijendra, N. K. A. (2022). Philosophical Meanings Behind Differences in Population Status Domiciled in Traditional Villages (desa Adat) in Bali, Indonesia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(3).

- Nordholt, H. G. C. S. (2010). *Bali, Benteng Terbuka 1995–2005. Otonomi daerah, demokrasi electoral, dan identitas-indentitas defensif*.
- Paramita, I. G. A. (2020). *Wajah Tuhan & sifat pemuja: kumpulan esai agama dan kebudayaan*. Sarwa Tattwa Pustaka.
- Paramita, I. G. A. (2022). *Genealogi Politik Identitas dalam Masyarakat Hindu di Bali*. Universitas Hindu Indonesia.
- Parimartha, I. G. (2013). *Silang pandang desa adat dan desa dinas di Bali*. Udayana University Press.
- Parimartha, I. G. (2020). Otonomi Desa Pakraman dan Munculnya Desa Dinas. In I Ngurah Suryawan (Ed.), *Dialektika Identitas Bali: Sehimpun Esai JumPa NgoPi #1* (pp. 26–39). Warmadewa Research Center & Prasasti.
- Picard, M. (2006). *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pitana, G., & Setiawan, G. A. P. (2013). Pariwisata sebagai Wahana Pelestarian Subak, dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata. *Jurnal Kajian Bali*, 3(2), 159–180.
- Putra, I. (2008). *Bali dalam kuasa politik*. Arti Foundation.
- Putra, I. N. D. (2011). Politik Identitas dalam Teks Sastrawan Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 1(1), 124–151.
- Raharjo, S., & Munandar, A. A. (1998). *Sejarah kebudayaan Bali: kajian perkembangan dan dampak pariwisata*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Stuart Hall. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (pp. 222–237). Lawrence and Wishartm.
- Suacana, W. G. (2011). Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 01(01), 88–123.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21–32.
- Suryawan, I. N. (2005). *Bali, narasi dalam kuasa: politik dan kekerasan di Bali*. Ombak.
- Suryawan, I. N. (2020). Mimpi Republik Desa dan Hasrat Pengaturan Negara. In I Ngurah Suryawan (Ed.), *Dialektika Identitas Bali: Sehimpunan Esai JumPa NgoPi #1* (pp. 110–116). Warmadewa Research Centre & Prasasti.
- Sutrisno, M. (2014). *Membaca rupa wajah kebudayaan*. PT. Kanisius.
- Triguna, I. B. G. Y. (2011). *Mengapa Bali unik?* Pustaka Jurnal Keluarga.
- Warren, C. (1993). *Adat and Dinas: Balinese communities in the Indonesian state*. Oxford University Press.
- Warren, C. (2007). Adat in Balinese discourse and practice: Locating citizenship and the commonweal. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*, 190–222.
- Yasa, I. W. P. (2020). Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 54–66.